

FISHERMEN POVERTY AND MARINE RESOURCES SUSTAINABILITY IN PELABUHANRATU, WEST JAVA, INDONESIA

KEMISKINAN NELAYAN DAN KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA LAUT DI PELABUHANRATU, JAWA BARAT, INDONESIA

Eva Royandi

Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

Email: royandi_250916@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

The poverty of fishermen and the sustainability of marine resources is very important for the interests of all people in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the poverty of fishermen in Pelabuhanratu, Sukabumi, West Java, Indonesia. The research data was obtained in the field for 3 months, starting from January to March 2019. The research location was carried out in the Archipelago Port Management (PPN) Pelabuhanratu, Sukabumi, West Java. The results showed that fishermen poverty and the problem of resource sustainability in Pelabuhanratu, first, the fishing communities in Pelabuhanratu still have a bond of dependence on middlemen with a moral economic system, so the process of purchasing fishermen's catch is still determined by the middlemen for the price. Second, there are actors outside of fishermen such as the managing actor of the Pelabuhanratu Steam Power Plant (PLTU) who have an influence on the process of managing marine resources at Pelabuhanratu.

Keywords: *fishermen, poverty, sustainability of marine resources*

ABSTRAK

Kemiskinan nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut menjadi sangat penting bagi kepentingan semua masyarakat di Indonesia. Tujuan penelitian ini, berusaha untuk menganalisis kemiskinan nelayan yang berada di Pelabuhanratu, Sukabumi Jawa Barat Indonesia. Data penelitian didapatkan di lapangan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2019. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengelolaan Pelabuhan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu, Sukabumi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan nelayan dan masalah keberlanjutan sumber daya di Pelabuhanratu, pertama, masyarakat nelayan di Pelabuhanratu masih memiliki ikatan ketergantungan pada tengkulak dengan sistem ekonomi moral, sehingga proses pembelian hasil tangkapan nelayan masih ditentukan oleh tengkulak untuk harganya. Kedua, adanya aktor di luar nelayan seperti aktor pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhanratu yang memberikan pengaruh kepada proses pengelolaan sumber daya laut di Pelabuhanratu.

Kata Kunci: Nelayan, Kemiskinan, Keberlanjutan Sumber Daya Laut

PENDAHULUAN

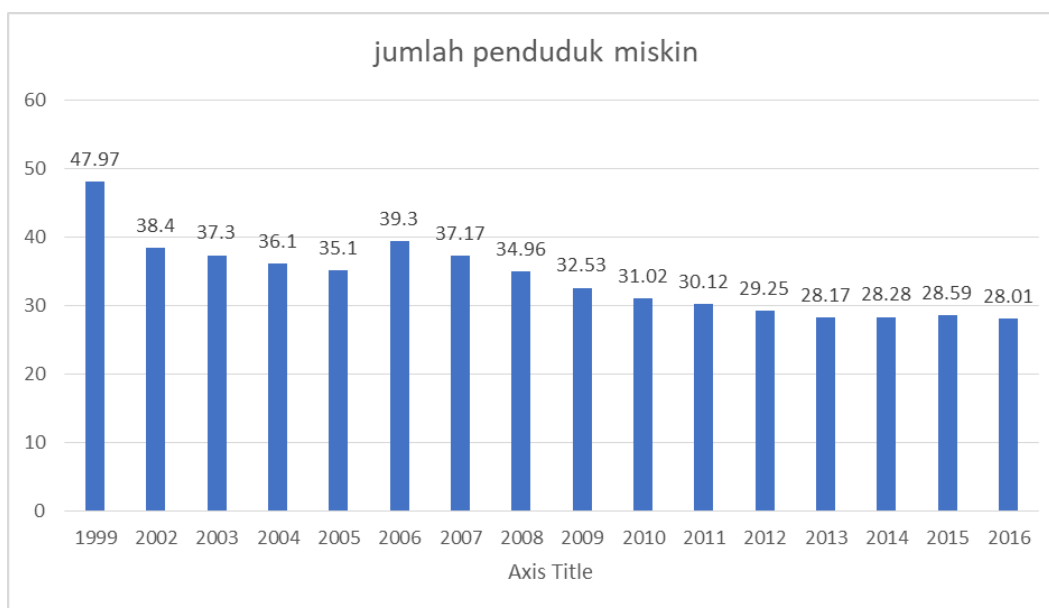
Wilayah laut Indonesia memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, perairan laut Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan atau *Maximum Sustainable Yield* (MSY) sebesar 7.3 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau *Total Allowable Catch* (TAC) sebesar 5.4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93 persen dari TAC. Total produksi perikanan mikro flora-fauna kelautan belum tereksplorasi secara penuh sebagai penyangka pangan fungsional pada masa depan (BPS, 2016). Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Potensi tersebut telah memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk bermatapencaharian yang berkaitan dengan sumberdaya kelautan dan perikanan. Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat ketergantungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Masalah sentral yang dihadapi oleh para nelayan adalah sifat mata pencaharian yang dekat dengan risiko krisis dan ketidakpastian (*crisis risk and uncertainty*) yang disebabkan beberapa hal, antara lain: *pertama*, dalam mencari nafkah nelayan sangat tergantung dengan cuaca/iklim yang berubah-ubah. *Kedua*, nelayan sangat tergantung pada sumber daya laut yang saat ini terpapar pada perubahan global yang disebabkan oleh *climate change* atau perubahan yang disebabkan oleh perubahan manusia (*human made*). *Ketiga*, penguasaan teknologi yang masih rendah. *Keempat*, nelayan menghadapi masalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. *Kelima*, aktivitas mencari nafkah nelayan sangat ketergantungan pada ketersediaan modal financial (Fauzi, 2005, dalam Mirajiani, 2014). Ideologi kapitalisme dan modernisme yang dibawa pasar dan program pembangunan oleh negara mempengaruhi aspek struktural dan hubungan sosial dalam pranata ekonomi sosial memaksa masyarakat nelayan untuk berubah sesuai dengan mekanisme yang ada di dunia kelautan dan perikanan (Mirajiani, 2014).

Isu strategi pembangunan di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi-JK salah satunya membumikan kembali kejayaan maritim sebagai kedaulatan bangsa. Data Badan Pusat statistik Indonesia (2016) yang mendukung isu pembangunan tersebut berdasarkan data bahwa wilayah laut Indonesia memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, perairan laut Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan atau *Maximum Sustainable Yield* (MSY) sebesar 7.3 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau *Total Allowable Catch* (TAC) sebesar 5.4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93 persen dari TAC. Total produksi perikanan mikro flora-fauna kelautan belum tereksplorasi secara penuh sebagai penyangka pangan fungsional pada masa depan.

Masalah yang dihadapi masyarakat termasuk masyarakat nelayan di Indonesia yaitu kemiskinan dan keberlanjutan sumber daya alam. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi-dimensional karena erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Pada dasarnya berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai strategi pembangunan.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 1999-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Pada periode 1999-2005 terlihat adanya tren penurunan jumlah dan presentase penduduk miskin. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 1999-2005 adalah sebesar 12,87 juta jiwa, yaitu 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 35,10 juta jiwa tahun 2005. Walaupun ada penurunan jumlah kemiskinan pada masyarakat Indonesia tidak menjamin bahwa masalah kemiskinan dapat diselesaikan dengan mudah.

Hasil survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Widodo (2011) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah indikator yang paling jelas dalam menunjukkan keberhasilan pembangunan nasional. Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di kawasan pesisir menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan. Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (BPS), diketahui bahwa hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan, jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan. Dengan demikian, setidaknya ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan (Hermadi, 2014). Akan tetapi, masyarakat nelayan terjebak dalam perangkap kemiskinan yang pelik. Mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan. Mereka juga sangat ketergantungan terhadap hubungan patron klien, sehingga masyarakat nelayan tetap berada dalam keadaan miskin.

Untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang khususnya perikanan perlu membutuhkan masyarakat nelayan. Salah satu arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Secara sosiologis masyarakat nelayan saat ini sedang mengalami transformasi masyarakat karena pembangunan dan penetrasi pasar/kapitalisme dalam sistem penghidupan. Penetrasi pembangunan dengan kapitalisme menyebabkan perubahan dalam semua aspek kehidupan yang penting, baik aspek budaya, ekologi, struktur sosial, termasuk sistem institusi dalam masyarakat (Mirajiani, 2014). Selain itu, masyarakat nelayan di Pelabuhanratu menghadapi masalah dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. Indonesia Power UJP Jabar 2 Pelabuhanratu, walaupun keberadaannya mulai tahun 2006 dan sejak awal mendapatkan protes dari masyarakat nelayan, tetapi program pembangunan Tenaga Listrik tersebut tetap berjalan dan sudah mulai beroperasi. Permasalahannya sebagai sumberdaya kelautan menjadi jalur

transfortasi pihak PLTU, dimana pada awalnya jalur tersebut merupakan tempat penangkapan ikan. Selain itu, ada indikasi pembuangan limbahnya mengalir ke laut pelabuhanratu, akibatnya telah dirasakan oleh nelayan dimana mereka kehilangan pekerjaannya karena ikan yang berkurang.

METODE PENELITIAN

Penekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan proses penelitian yang dilakukan di PPN Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan observasi secara langsung ke wilayah Pelabuhanratu. Kemudian menggunakan teknik wawancara mendalam dengan 30 informan. Informan memiliki hubungan dengan sumber daya laut dan tentunya yang terkait dengan kebutuhan data tentang masalah kemiskinan nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat sebagai lokasi penelitin ini. Analisis dan pengambilan data dengan menggunakan model interaktif yang terdiri atas reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data. Ketiga proses analisis tersebut saling menjalin sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data (Miles and Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Kelautan dan Perikanan di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang luar biasa di bidang kelautan dan perikanan. Lautan Indonesia adalah *Marine Mega Biodiversity* terbesar di dunia: 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Sumber daya ikan meliputi ikan pelagis, demersal, ikan karang, udang, lobster dan cumi-cumi. Total potensi lestari 6.409.210 ton/tahun, produksi 4.069.420 ton/tahun, tingkat pemanfaatan 63,49% (LIPI-BRKP, 2001). Apabila potensi sumber daya kelautan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan tentunya mengedepankan keberlanjutan, sehingga ke depannya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Tabel 2
Luas Laut Indonesia

No	Perairan	Luas (km ²)
1	Perairan Kepulauan/Laut Nusantara	2,3 Juta
2	Perairan Territorial	0,8 Juta
3	Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	2,7 Juta
	Jumlah	5,8 Juta

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (2007)

Luasnya perairan yang dimiliki negara Indonesia menggambarkan bahwa luasnya lahan bagi perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan masyarakat nelayan. Namun, tingkat eksploitasi sumberdaya kelautan setiap wilayah pemanfaatan sumberdaya kelautan tidak sama. Kawasan yang sudah *overfishing*, misalnya di laut Jawa. Hal ini menyebabkan penghasilan nelayan di kawasan itu menjadi relatif rendah. Hal ini yang juga menambah masalah yaitu di laut Jawa jumlah nelayannya adalah terbanyak. Sementara kawasan yang masih '*underexploited*' adalah di kawasan yang relatif jauh sulit di jangkau atau bergelombang besar (Syah, 2012).

Masyarakat Nelayan

Untuk memahami pengertian nelayan menurut Pollnac (1998) dalam Satria (2015) menyatakan bahwa pernah membedakan nelayan ke dalam dua kelompok menjadi nelayan besar (*large scale fisherman*) dan nelayan kecil (*small scale fisherman*). Perbedaan ini berdasarkan respons untuk mengantisipasi tingginya risiko dan ketidakpastian. Tampaknya pengelompokan Pollnac tersebut kurang memadai untuk konteks negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Satria (2015) menyatakan bahwa ada empat tingkatan nelayan dilihat dari

kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi.

Pertama, peasan-fisher atau nelayan tradisional, yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistensi). Sebutan ini muncul karena alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha (Satria, 2001 dalam satria, 2015).

Kedua, berkembangnya motorisasi perikanan menjadikan nelayan berubah dari *peasant-fisher* menjadi *post-peasant fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan lebih maju seperti motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan lebih jauh sehingga mereka memperoleh surplus dari hasil tangkapan itu. Umumnya nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah pesisir. Pada tipe ini, nelayan sudah mulai berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja atau ABK sudah meluas dan tidak tergantung pada anggota keluarga (Satria, 2015).

Ketiga, adalah *commercial fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah membesar yang dicirikan dengan besarnya jumlah tenaga kerja dan status yang berbeda: dari buruh hingga manajemen. Teknologi yang digunakan pun sudah lebih modern, membutuhkan keahlian tersendiri baik dalam mengoperasikan kapal maupun alat tangkap.

Keempat, adalah *industrial fisher*, yang pengertiannya dapat mengacu pada Pollnac (1998) dalam Satria (2015), yakni: (a) diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju; (b) secara relatif lebih padat modal; (c) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu dan (d) menghasilkan ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

Patron-Klien sebagai Ciri Masyarakat Nelayan

Cukup banyak interpretasi politik perdesaan di Asia Tenggara, terutama dari Antropolog, yang menegaskan apa yang disebut sebagai model aksi “patron klien” atau “solidaritas vertikal” (Lande, 1964 dalam Scott, 1972). Dalam pola patron klien, pada petani kurang lebih diwakili secara pasif. Struktur sosial masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan patron-klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan berbagai risiko dan adanya ketidakpastian. Patron-Klien merupakan basis relasi sosial masyarakat nelayan atau pesisir. Relasi sosial patron-klien sangat dominan dan terbentuk karena karakteristik kondisi mata pencaharian, sistem ekonomi, dan lingkungan (Kusnadi, 2009).

Kuatnya ikatan patron klien merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola patron klien merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena sampai saat ini nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka (Satria, 2015).

Teori patron klien Scott menjelaskan ikatan antara pelindung (patron) dan klien, satu bentuk asuransi sosial yang terdapat di mana-mana di kalangan petani Asia Tenggara, merupakan satu langkah jauh lainnya dalam jarak sosial dan seringkali moral, teristiwanya apabila sang pelindung bukan warga desa. Apakah ia seorang tuan tanah, seorang pejabat kecil atau pedagang, seorang patron menurut definisinya adalah orang yang berada dalam posisi untuk membentuk klien-kliennya (Scott, 1989). Klien-klien seringkali berusaha dalam hubungannya untuk memberikan arti moral sehingga kedudukan mereka dalam menghadapi patron menjadi lemah. Hubungan patron klien adalah kasus khusus yang berkaitan dengan hubungan dua orang yang sebagian besar melibatkan hubungan instrumental yang mana adanya seseorang yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi, sehingga patron dapat menggunakan pengaruh dan sumberdaya dalam memberikan perlindungan atau memberikan suatu bentuk keuntungan kepada yang lebih lemah status sosial ekonominya. Akhirnya klien membalas pemberian

tersebut dengan suatu dukungan dan bantuan karena tindakan tersebut menurut klien merupakan jasa pribadi kepada patron.

Adanya mekanisme tindakan ekonomi sosial dalam kelembagaan patronase yang dikemukakan oleh Scott tersebut yang dimaksudkan oleh Granovetter sebagai rasionalitas sosial ekonomi dengan *social-embeddedness* (Mirajiani, 2014). Granovetter membedakan dua bentuk keterlekatan yaitu; keterlekatan relasional dan keterlekatan struktural. Penjelasan di mana keterlekatan relasional merupakan tindakan ekonomi yang distuasikan secara sosial dan melekat (*embedded*) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Hubungan tersebut dapat melibatkan berbagai aspek sosial budaya, agama, dan politik. Sedangkan, keterlekatan struktural merupakan keterlekatan yang terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang lebih luas. Jaringan hubungan yang lebih luas, bisa merupakan institusi atau struktur sosial.

Kemiskinan Masyarakat Nelayan

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam (BPS, 2016) yaitu: pertama, adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dalam kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok orang masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti, dan bersifat multidimensional. Disebut cair, karena kemiskinan bisa bermakna subjektif. Tetapi sekaligus juga bermakna objektif. Secara objektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin, karena pendapatannya sudah berada di atas garis kemiskinan, yang oleh sementara ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi¹ (Imron, 2003). Kaitannya dengan masyarakat nelayan, kemiskinan dalam dimensi ekonomi itu secara kualitatif dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan yang seadanya, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah. Begitu pula kondisi pendidikan yang rendah.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Penyebab kemiskinan nelayan di Indonesia sangat kompleks, penyebab individual, keluarga, sub-budaya, agensi maupun struktural saling berkaitan. Menurut Kusnadi dalam Imron (2003), sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada nelayan adalah pertama, belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu di antara para pemangku kepentingan pembangunan. Kedua, adanya inkonsistensi kuantitas produksi (hasil tangkapan). Ketiga, masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar-masuk arus barang, jasa, kapital, dan manusia, yang mengganggu mobilitas sosial ekonomi. Keempat, adanya keterbatasan modal usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya. Kelima, adanya relasi sosial ekonomi yang “eksploitatif” dengan pemilik perahu, pedagang perantara (tengkulak), atau pengusaha perikanan dalam kehidupan masyarakat nelayan. Keenam, rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas mereka.

¹ Ukuran kemiskinan yang objektif (kemiskinan absolut) tersebut antara lain dikemukakan oleh Sayogya, dengan mengklasifikasikan kelompok miskin menjadi tiga kategori, yaitu: kelompok paling miskin, yaitu yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, kelompok miskin sekali, yang memiliki pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 – 360 kg, dan kelompok miskin yang memiliki pendapatan per kapita 360 – 480 kg beras.

Studi Kasus Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu

Masyarakat nelayan di pelabuhanratu terdapat empat tipe tingkatan nelayan dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi yaitu; *pertama*, adanya nelayan tradisional di mana penangkapan ikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten sehingga hasil-hasil dari kegiatan perikanan banyak yang dibawa ke keluarganya untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan apabila ada yang dijual hanya ditingkat rumah tangga atau tetangga tempat tinggal nelayan. Kebanyakan teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dan beroperasinya tidak jauh dari wilayah pesisir. Jumlah nelayan tanpa motor di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu (PPNP) berjumlah 222 kapal.

Kedua, adanya bantuan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan dan terbukanya infrastruktur yang mulai membaik telah memberikan peluang kepada masyarakat nelayan di Pelabuhanratu, di mana penggunaan teknologi mulai dikembangkan dari teknologi tanpa motor ke teknologi dengan menggunakan motor, walaupun sampai saat ini, masih ada masyarakat nelayan Pelabuhanratu yang masih menggunakan perahu tanpa motor. Misalnya beberapa perubahan yang diakibatkan oleh program Minapolitan di antaranya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan dalam bentuk sarana melaut dan prasarana fisik perikanan di kabupaten sukabumi termasuk pelabuhanratu yaitu: *pertama*, bantuan 10 unit kapal motor Inka Mina di atas 30 GT. *Kedua*, bantuan sembilan unit kapal rumpon di atas 10 GT. *Ketiga*, bantuan 28 unit kapal multipurpose (3GT) untuk nelayan Cisolok, Pelabuhanratu, Ciwaru dan Ujung Genteng. *Keempat*, bantuan dua unit keramba jaring apung di Cibangan dan 4 unit jaring apung di Sangrawayan. Kelima, peningkatan infrastruktur (Imron, 2016).

Adanya bantuan tersebut telah merubah karakteristik nelayan di kabupaten Sukabumi khususnya di Pelabuhanratu, karena saat ini masyarakat nelayan sudah menggunakan peralatan teknologi yang diberikan oleh pemerintah. Perubahan ini juga telah menimbulkan persaingan di antara pelaku usaha dan nelayan inilah yang bisa disebut juga sebagai adanya *new agent*. Selain itu, masyarakat nelayan di pelabuhanratu telah mengalami transisi dari norma ekonomi subsisten ke norma ekonomi pasar yang berorientasi pada keuntungan dan nilai tambah.

Ketiga, nelayan komersial adalah nelayan yang tujuan dari kegiatan perikanannya untuk mendapatkan keuntungan dan investasi demi kemajuan usahanya dan bukan lagi pada ekonomi subsisten. Biasanya teknologi yang digunakan sudah cukup berkembang. Jenis kelembagaan tersebut terdapat di pelabuhanratu rata-rata pada perahu di atas ukuran 10 GT. Umumnya beroperasi di laut lepas dan masih menggunakan sistem bagi hasil.

Keempat, nelayan industrial, pada tahap ini orientasi sudah kepada keuntungan dan nilai tambah sehingga memengaruhi teknologi yang digunakan di mana teknologi yang digunakan umumnya sudah tergolong tinggi dan dapat beroperasi di laut lepas bahkan laut internasional. Selain itu, umumnya sistem organisasi produksi sudah menggunakan sistem upah di mana tidak lagi menggunakan sistem bagi hasil. Masyarakat nelayan di Pelabuhanratu pelaku usaha perikanan berada pada penangkapan ikan tuna yang kebanyakan pelaku usahanya di luar masyarakat nelayan pelabuhanratu seperti nelayan yang berasal dari etnik Bugis dan Etnik Jawa.

Analisis yang menjadi pusat perhatian dalam makalah ini adalah masyarakat nelayan khususnya nelayan kecil di Pelabuhanratu. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, mendefinisikan bahwa nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

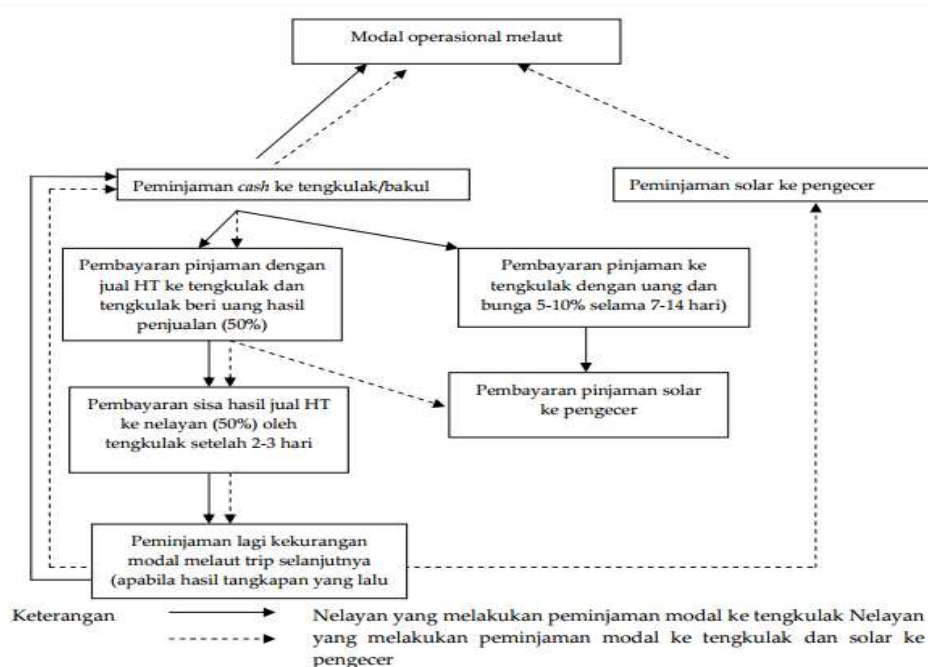
Hasil penelitian Lubis *et al.*, (2012) masyarakat nelayan kecil di Pelabuhanratu yang sulit diubah adalah sistem langgan yang sudah mendarag daging. Sistem langgan terjadi ketika nelayan tidak lagi memiliki modal untuk melaut, keadaan ini memaksa nelayan untuk meminjam uang kepada para tengkulak. Bentuk timbal baliknya, nelayan harus menjual ikan hasil tangkapannya.

Keterikatan nelayan-patron terus berlanjut dan tidak diketahui sampai kapan berakhirnya. Bahkan informasi hutang nelayan hanya didapat informasinya dari patron. Selain hubungan yang tidak seimbang tersebut nelayan juga menghadapi masalah sumberdaya yang sebagian wilayah sumberdaya kelautan di pagai untuk kepentingan PLTU pelabuhanratu salah satunya sebagai transfortasi pengangkut batu bara.

Patron ini bisa berupa bakul ikan di mana dalam hubungan jual beli ikan antara para nelayan dan bakul atau pedagang sering bersifat mengikat daripada atas dasar sukarela. Hal ini terjadi karena para nelayan tersebut secara rutin dan berkesinambungan mendapatkan “uang pengikat” (ijon) dari para bakul ikan. Kuatnya ikatan tersebut dan ditambahnya penetrasi pembangun dan terbaru ada aktor baru yaitu pihak PLTU Pelabuhanratu semakin memperkuat memberikan dampak kemiskinan pada masyarakat nelayan di Pelabuhanratu, sehingga tidak ada pilihan bagi nelayan selain adanya ketergantungan kepada para patron.

Sekitar 60 persen dari 17 ribu nelayan di Sukabumi, Jawa Barat, hidup di bawah garis kemiskinan. 60 persen nelayan di Sukabumi termasuk pelabuhanratu masih miskin (Republika, 2011). Faktor yang paling kuat yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Pelabuhanratu yaitu karena kuatnya sistem pinjam modal, karena nelayan kecil tidak memiliki modal.

Gambar 1
Alir peminjaman dan pengembalian modal melaut nelayan Pelabuhanratu (2011)



Sumber: Lubis et al., 2012.

Sistem pinjaman tersebut, lebih menguntungkan para pemilik modal, karena kebanyakan nelayan tidak tahu yang berkaitan dengan harga ikan. Terpenting nelayan harus menjual ikan ke tengkulak atau pemilik modal. Hasil penelitian Lubis et al., (2012), nelayan Pelabuhanratu, bahwa dalam memasarkan hasil tangkapan selama belum adanya pelelangan ikan, maka patron yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan kliennya seperti nelayan dan sepertinya hal ini sulit dilepaskan seolah-olah nelayan tidak menyadari kerugian yang dideritanya dan akhirnya faktor kapital/modal menjadi sangat dominan dalam menentukan nasib nelayan di Pelabuhanratu Sukabumi.

Faktor eksternal yang memengaruhi permasalahan masyarakat nelayan di perairan laut Pelabuhanratu yaitu adanya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh berbagai kegiatan ekonomi, di antaranya digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), transfortasi, dan perikanan tangkap. Perairan laut pelabuhanratu merupakan tempat

aktivitas penangkapan ikan bagi para nelayan, mulai dari nelayan tradisional, nelayan kecil, nelayan komersial, dan nelayan industri. Akan tetapi, sifat multifungsi perairan laut menyebabkan banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkannya, terutama kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi. Permasalahan muncul ketika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), muncul sebagai aktor baru yang merupakan kepentingan pembangunan nasional sesuai dengan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006, tentang penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Perspres tersebut, menjadi dasar pembangunan 10 PLTU di Jawa termasuk PLTU Pelabuhanratu dan 25 PLTU di luar Jawa Bali.

Munculnya permasalahan, ketika pembangunan PLTU dituding penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan, sehingga mempersulit penangkapan ikan bagi para nelayan dan merusak peralatan penangkapan ikan di perairan laut Pelabuhanratu, karena sebagian wilayah perairan laut digunakan untuk transportasi pengangkutan batubara oleh pihak PLTU. PLTU turut menyumbangkan faktor daftar kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan mereka di laut. Bukan hanya pada jarak yang harus ditempuh, isu pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan PLTU juga turut andil dalam permasalahan nelayan, sehingga permasalahan tersebut memunculkan konflik antara nelayan dengan PLTU (Syatori, 2014). Adanya permasalahan sumber daya alam tersebut, telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat nelayan, sehingga terjadi kemiskinan yang berkelanjutan pada masyarakat nelayan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong nelayan di Pelabuhanratu mengalami kemiskinan dan menghadapi masalah keberlanjutan sumber daya laut. *Pertama*, masalah kemiskinan di Pelabuhanratu lebih banyak disebabkan karena ketergantungan nelayan kepada tengkulak. Sebab, dengan memiliki ketergantungan kepada tengkulak dapat memengaruhi sistem penangkapan dan penjualan hasil tangkapan, meskipun hubungan patron-klien antara nelayan dengan tengkulak untuk saling membutuhkan dalam menjamin kehidupan nelayan. *Kedua*, permasalahan kemiskinan dan keberlanjutan sumber daya laut di Pelabuhanratu karena adanya aktor baru yang hadir yaitu Pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan wilayah pesisir termasuk tanah-tanah nelayan dan wilayah laut, keberadaannya dianggap memberikan kerusakan bagi sumber daya laut dan memengaruhi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan termasuk menyebabkan kemiskinan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis E, Pane AB, Muningsar R, Hamzah A. (2012). Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkap: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu. *Maspari Journal*, 4 (2), 159-167.
- Mirajiani, Wahyuni ES, Satria A, Saharuddin, Kusumastanto T. (2014). Transformasi Pranata Patronase Masyarakat Nelayan: Dari Ekonomi Moralitas Menuju Ekonomi Pasar. *Jurnal Komunitas*, 6 (1): 115-134. DOI: 10.15294/komunitas.v6i1.2950.
- Granovetter, M., & Swedberg, Richard (edit). (1992). *The Sociology of Economic Life*. Granovetter, M., & Swedberg, Richard (edit). Boulder, San Francisco, Oxford (US): Westview Pr.
- Satria A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scott JC. (1989). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta (ID): Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Scott JC. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Kusworo B, Jhantani H, Pabotingi M, Wiradi G, Penerjemah. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
- Imron M. (2016). Penerapan Program Minapolitan Perikanan Tangkap dalam Memberdayakan Nelayan Kecil Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 18 No. 2 Tahun 2016.

- Imron M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. Jurnal masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 Tahun 2003.
- BRKP dan LIPI. (2001). Pengkajian Stok Ikan di Perairan Indonesia. Kerjasama PRPT-BRKP-DKP dan PPPO-LIPI, Jakarta.
- Harmadi SHB. Nelayan Kita. Koran Kompas. Tanggal 19 November 2014.
- Republika. (2011). 60 Persen Nelayan Sukabumi Miskin [Internet]. Di akses tanggal 20 Juni 2017. Dapat di akses dari: <http://www.republika.co.id/berita/regional/jawa-barat/11/06/27/lng9by-60-persen-nelayan-sukabumi-miskin>.